

UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Farah Adiba; Kaslam

Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

etos.kaslam@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pandemi covid-19 merupakan pandemi yang berdampak global dengan tingkat penyebaran yang tinggi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya terkait ketersediaan pangan di Indonesia. Wabah Covid-19 mempengaruhi sektor pangan melalui berbagai mekanisme, mulai dari gangguan pada perdagangan internasional sampai pada penurunan produksi dalam negeri dan penurunan daya beli masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan terfokus pada data yang bersifat non-numerik sehingga erat kaitannya dengan pengembangan dan penjelasan fenomena sosial. Analisa data menggunakan teknik deskriptif analisis dengan berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi dengan informasi data berupa siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana. Hasilnya bahwa upaya Pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 berkonsentrasi pada lima prioritas yaitu : (1) Menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras dan jagung; (2) Mempercepat ekspor komoditas strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara; (3) Memberitahukan kepada petani dan penyuluh protokol kesehatan dari Kemenkes untuk membatasi penyebaran virus; (4) Mengembangkan pasar pertanian di masing-masing provinsi, meningkatkan konsumsi pangan lokal, dan membangun infrastruktur logistik serta sistem pemasaran elektronik untuk komoditas pertanian; (5) Menerapkan proyek padat karya di daerah perdesaan untuk membantu sektor pertanian dan menyediakan dana bagi masyarakat perdesaan untuk meringankan dampak negatif Covid-19.

Kata Kunci;

Pandemi Covid-19; Krisis Pangan; Upaya Pemerintah

Abstract

The COVID-19 pandemic is a pandemic that has a global impact with a high rate of spread and affects various aspects of people's lives. One of them is related to the availability of food in Indonesia. The Covid-19 outbreak has affected the food sector through various mechanisms, ranging from disruption to international trade to decreased domestic production and people's purchasing power. The research method used in this study is qualitative research with a focus on non-numeric data so that it is closely related to the

development and explanation of social phenomena. Data analysis uses descriptive analysis techniques by trying to describe the phenomenon that occurs with data information in the form of who, what, when, where and how. The result is that the Government's efforts to deal with the impact of Covid-19 concentrate on five priorities, namely: (1) Ensuring the availability of staple foods, especially rice and corn; (2) Accelerating the export of strategic commodities to maintain the country's economic growth; (3) Informing farmers and health protocol extension workers from the Ministry of Health to limit the spread of the virus; (4) Develop agricultural markets in each province, increase local food consumption, and build logistics infrastructure and electronic marketing systems for agricultural commodities; (5) Implement labor-intensive projects in rural areas to assist the agricultural sector and provide funds for rural communities to mitigate the negative impacts of Covid-19.

Keywords;

Covid-19 Pandemic; Food Crisis; Government Efforts

Pendahuluan

Kemunculan dan penularan Covid-19 dimulai di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 dan kemudian menyebar pada skala global dan dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Menjelang awal minggu kedua bulan Maret, virus corona telah berhasil masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintah di Indonesia mulai sibuk membahas bagaimana mengatasi covid-19 agar tidak menyebar luas di Indonesia. Menjelang akhir Juli 2020, lebih dari 15 juta orang sudah dites positif mengidap Covid-19 dan menyebabkan lebih dari 610.000 kematian. Kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada bulan Maret 2020 dan menyebar dengan cepat keseluruh wilayah negara Indonesia. Mendekati akhir bulan Juli 2020, Covid-19 di Indonesia sudah menyebabkan sekitar 100.000 kasus terkonfirmasi dan sekitar 5.000 kematian¹.

Penanganan covid-19 yang dilakukan tak kunjung reda dan meningkatnya status positif masyarakat Indonesia terjangkit virus corona semakin memperjelas bahwa Indonesia telah diambang bencana wabah Nasional. Karena kondisi yang tak kunjung membaik, maka Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020 menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam. Penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, penetapan diikuti

¹John Hopkins University, " -19 Dashboard, <https://coronavirus.jhu.edu/map.html> (18 September 2021)

dengan Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus covid-19 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020².

Pandemi covid-19 merupakan pandemi yang berdampak global dengan tingkat penyebaran yang tinggi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ternyata penyebaran Covid-19 sangat cepat dan menimbulkan dampak yang meluas antar wilayah sehingga mengganggu keberlangsungan berbagai sektor. Pandemi tersebut mengakibatkan terjadinya krisis di banyak negara/daerah.

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada didalam rumah, menerapkan *Physical Distancing* dan *Social Distancing* serta tetap menggunakan masker dan menjaga kebersihan guna memutus rantai penyebaran covid-19, namun himbauan tersebut tidak terealisasi secara maksimal di masyarakat sehingga angka positif terkena covid-19 terus bertambah. Penyebaran pandemi covid-19 yang semakin meningkat menimbulkan kekhawatiran didalam masyarakat terkait ketersediaan pangan di Indonesia. Wabah Covid-19 mempengaruhi sektor pangan dan pertanian melalui berbagai mekanisme, mulai dari gangguan pada perdagangan internasional sampai pada penurunan produksi dalam negeri dan penurunan daya beli masyarakat³. Seperti yang telah dilansir oleh organisasi dunia seperti Food and Agriculture Organization (FAO), International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan United Nation (UN) bahwa pandemi covid-19 berpotensi menimbulkan krisis pangan baru yang tentunya mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama bagi negara miskin dan negara berkembang⁴.

Kebijakan lainnya yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan membatasi semua akses gerakan ekonomi masyarakat dengan menutup pusat-pusat kegiatan public yang dikhawatirkan menjadi penyebab baru penyebaran covid-19. Mengakibatkan terjadinya PHK secara besar-besaran dan puluhan ribu orang kehilangan mata pencaharian, maka orang miskin bertambah terutama di daerah perkotaan.

Pembatasan kegiatan sangat berpengaruh terhadap lalu lintas barang dan komoditas antarnegara akibat pandemi yang telah berdampak pada persediaan pangan. Ketenagakerjaan dibidang pertanian diperkirakan akan mengalami

²A.Justriadi, dkk., *Food Crisis Mitigation Management In The Covid Pandemic Era Covid-19*, Journal of Governance and Local Politics, Vol. 2. No. 2 (2020): h. 217

³Sirojuddin Arif, dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 40

⁴Andy Dwijayanto, "Ini Solusi Terhadap Ancaman Pangan Selama Pandemi Covid-19", Kontan, <https://industri.kontan.co.id/news/ini-solusi-terhadap-ancaman-ketahanan-pangan-selama-pandemi-covid-19> (18 September 2021).

kontraksi sebesar 4,87 persen, sedangkan produksi pertanian domestic akan menyusut sebesar 6,2 persen. Impor akan turun sebesar 17,11 persen dengan harga melonjak naik sebesar 1,20 persen dalam jangka waktu pendek dan sebesar 2,42 persen pada tahun 2022. Dengan demikian, berkurangnya pasokan dalam negeri dan dari impor, kekurangan pangan dan inflasi harga makanan berpotensi besar terjadi.

Menurut proyeksi Core Indonesia penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemic covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial baik dalam skala besar maupun kecil⁵. Secara kritis kondisi Indonesia diperparah dengan kondisi situasi Krisis Pangan terutama beras secara nasional. Pada bulan Mei 2020, ummat Islam akan melaksanakan pembayaran zakat menjelang akhir bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Jumlah masyarakat yang akan mengeluarkan zakat membutuhkan beras paling tidak sekitar 200 juta jiwa penduduk Indonesia atau setara dengan beras 500 ribu ton dimana penggunaanya serentak dibutuhkan dalam satu waktu.

Tentu hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri terhadap kondisi pangan Indonesia dimana telah terjadi peningkatan permintaan dalam jumlah yang besar serta bersifat simultan dan wajib dipenuhi. Menurunnya aktivitas usaha dan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat juga mempengaruhi *supply chain sector* pangan khususnya beras sehingga ancaman krisis pangan semakin terlihat sehingga sangat dibutuhkan upaya pencegahan atauantisipasi dari Pemerintah Indonesia yang tentunya sesuai dengan kondisi Nasional di tengah pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif terfokus pada data yang bersifat non-numerik sehingga erat kaitannya dengan pengembangan dan penjelasan fenomena sosial. Metode penelitian kualitatif melihat pada teks dan data berupa gambar, memiliki langkah- langkah unik dalam analisis data dan memiliki desain data yang beragam Analisa dengan metode kualitatif diperluas dengan beberapa prosedur berupa penyajian data, interpretasi data, validasi data dan memperlihatkan hasil potensial penelitian.

Dalam pengolahan dan analisa data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dari William Zikmund. Menurut teknik ini, metode deskriptif analisis merupakan transformasi dari data mentah menjadi bentuk deskripsi

⁵Fahri, Abd. Jalil, Sri Kasnelly, *Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid-19)*, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 (2019): h. 47

yang membuat pembaca mudah untuk memahami isi penelitian. Dengan teknik ini deskriptif, penulis berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi dengan informasi data berupa siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana.

Dalam proses penelitian, data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini dengan menggunakan Teknik pengumpulan data studi dokumen. Peneliti dapat memperoleh data dari dokumen dan materi visual. Dokumen dapat berupa dokumen publik seperti koran, hasil rapat, dan laporan resmi, sedangkan melalui dokumen pribadi berupa jurnal pribadi, surat dan email⁶. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari buku dan media elektronik seperti berita dan jurnal ilmiah online. Peneliti juga memperoleh beberapa data dari dokumen publik yang dikeluarkan oleh pemerintah negara.

Negara dan Ketahanan Pangan

Istilah Negara merupakan terjemahan kataasing : state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Negara identik dengan hak dan kewenangan⁷.

Menurut Muhammad Nasir bahwa fungsi negara sebagai institusi kelembagaan yang hidup dan mempunyai fungsi memimpin, memberikan bimbingan, memenuhi kebutuhan dan menyelamatkan masyarakat keseluruhannya baik materil ataupun spiritual. Dan melihat persoalan umat manusia dalam rangka yang besar itu negara tidaklah boleh mengelakkan diri dari fungsinya yang diharapkan dari padanya itu. Tidaklah negara itu akan dapat melakukan kewajibannya apabila ia tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat dan teguh serta jelas berurat-berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan dari rakyatnya⁸.

Suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Ketiga unsur tersebut disebut unsur Konstitutif. Ketiga unsur ini perlu di tunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia Internasional dengan unsur deklaratif. Rakyat dalam

⁶John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publication, 2014), h. 32

⁷A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 84

⁸Muhammad Natsir dkk, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), h. 62

pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah substratum personel dari negara. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional.

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial. Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur negara lainnya, konstitusi.

Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Sedangkan pengakuan *de jure* merupakan pengakuan akan adanya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan *de jure*, maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif negara, pangan menjadi kebutuhan utama bagi rakyat dan kebutuhan sifatnya tidak bisa ditunda-tunda. Manusia bisa saja tidak memiliki tempat tinggal yang layak tidak berpakaian yang layak, bahkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang kurang baik dalam waktu yang sementara. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan pangan harus setiap saat tersedia. Negara tidak bisa

menunda impor pangan ketika ketersediaan pangan dalam negeri tidak mencukupi dan rakyat terancam kelaparan.

Konsep Ketahanan Pangan Konsep ketahanan pangan (food security) secara harfiah mempunyai definisi terjaminnya akses pangan untuk segenap masyarakat dan secara merata untuk mendapatkan hidup yang sehat. Ada banyak aspek terkait dengan konsep ketahanan pangan, namun yang paling utama aspek ekonomi⁹. Karena konsep ketahanan pangan akan selalu mulai dengan kemampuan masyarakat atau individu dalam memenuhi kebutuhan pangannya dengan harga yang terbilang terjangkau baik bagi kalangan atas, menengah, dan terutama masyarakat dari kalangan yang kurang mampu¹⁰.

Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi, untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

Terkait dengan konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu tersebut perlu pula diperhatikan aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. Dalam perumusan kebijakan maupun kajian empiris ketahanan pangan, penerapan konsep ketahanan pangan tersebut perlu dikaitkan dengan rangkaian sistem hirarki sesuai dimensi sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga, masyarakat/komunitas, regional, nasional maupun global¹¹.

Konsep ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi, sehingga konsep ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem utama yaitu¹²:

1. Subsistem Ketersediaan Pangan yang mencakup aspek produksi pangan. Subsistem ketersediaan pangan ini mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan, baik dari cadangan impor atau dari produksi.

⁹Firsty Nabila Putri Hartadi, *Analisa Peran World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan di Guinea-Bissau Tahun 2016-2017*, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 16.

¹⁰Handewi P. S. Rachman, Mewa Ariani, *Ketahanan Pangan: Komsep, Pengukuran, dan Strategi*, Jurnal FAE, Vol. 20, No. 1 (2002): h. 12.

¹¹Firsty Nabila Putri Hartadi, *Analisa Peran World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan di Guinea-Bissau Tahun 2016-2017*, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 16.

¹²Firsty Nabila Putri Hartadi, *Analisa Peran World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan di Guinea-Bissau Tahun 2016-2017*, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 17.

2. Subsistem Distribusi Pangan mencakup penyebaran pangan yang harus merata. Tidak hanya itu, penyebaran pangan juga harus disertai dengan harga pangan yang terjangkau untuk masyarakat, individu maupun rumah tangga. Sehingga subsistem distribusi pangan ini bertujuan untuk menjamin aksesibilitas pangan dan stabilitas harga pangan.
3. Subsistem Konsumsi Pangan mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan gizi yang baik, mengontrol harga pangan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik dan mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Karena permasalahan dari ketahanan pangan yang utama adalah ekonomi, dimana masyarakatnya tidak mampu membeli atau harga pangan yang tidak terjangkau oleh masyarakat- masyarakat.

Sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya terkait masalah produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan¹³.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu Negara, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena sektor ini menjadi penyedia pangan utama, terlebih bagi negara yang sedang berkembang, karena memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama pembangunan dan salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan¹⁴.

Dalam konteks islam, sumber daya alam khususnya penghasil bahan pangan adalah anugerah yang Allah swt anugerahkan pada suatu negeri yang senantiasa memiliki rasa syukur. Pangan yang menjadi bahan pokok dalam keberlangsungan hidup harus senantiasa tercukupi ketersediaannya. Ketahanan

¹³ Heri Suharyanto, *Ketahanan Pangan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2, (2011): h. 187

¹⁴ Virginia V. Rumawas, dkk., *Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Srudi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)*, Jurnal Governance, Vol. 1, No. 1, (2021): h. 2

pangan suatu negeri merupakan suatu hal yang harus menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu, harus diatur dengan baik agar tidak terjadi krisis pangan terutama pada masa paceklik.

Didalam Q.S Saba' 15 Allah swt. Berfirman :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Terjemahan

Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) "Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun."

Pada ayat ini Allah swt berkisah tentang penduduk negeri Saba', yaitu suatu negeri (di kota Ma'rib di Yaman) di mana Allah swt memberikan banyak kenikmatan, tetapi kemudian mereka berbuat kekufuran kepada Allah swt. Mereka tidak bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan tersebut. Namun sebaliknya, mereka bertambah kufur kepada Allah swt. Allah swt menceritakan kisah Saba' -sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh as-Sa'di rahimahullah- bagaimana kaum Saba' diberikan banyak kenikmatan. Namun, kenikmatan tersebut tidak bertahan lama, karena setelah itu semuanya berubah menjadi kesengsaraan. Akibatnya mereka pergi dari negeri mereka. Mereka meninggalkan lokasi Ma'rib dan tercerai berai, ada yang menuju Yaman, Oman, San'a, Arab Saudi -di antara mereka merupakan suku al-Khazraj yang kemudian menjadi kaum al-Anshar- maupun ke Syam.

Di antara tanda kebesaran Allah swt yang ada pada negeri Saba' adalah terdapat dua kebun yang indah dan subur di sebelah kanan dan kiri yang menyerupai surga. Mereka memiliki sebuah bendungan yang menampung air. Apalagi pada saat turun hujan, banyak air hujan yang mengalir dan berkumpul di dalam bendungan tersebut. Berkat kesuburan tanah, penduduk Saba hidup serba kecukupan. Mereka bisa tidur nyenyak, sandang dan pakaian yang cukup, tidak kekurangan makanan. Kondisi alam itulah yang memanjakan kehidupan mereka. Ketika utusan Allah SWT diutus untuk memperingatkan kaum Saba untuk bersyukur atas karunia yang diberikan oleh-Nya dan menjaga warisan nenek moyang mereka, tetapi mereka enggan dan tidak menghiraukannya. Bahkan, elite negeri bekerjasama dengan penguasa untuk melubangi bendungan Ma'rib untuk mengairi proyek perumahan mereka. Sehingga, tempat resapan air hilang, dan terjadilah erosi. Pada akhirnya bendungan tersebut jebol dan

terjadilah banjir besar (sailal 'arimi). Berubalah tanah yang subur menjadi gersang.

Kisah ini menjadi pelajaran bagi Indonesia, bahwa negara yang dikaruniai sumber daya pangan yang melimpah, yang kemudian dihantam dengan pandemic covid-19, menjadi kalang kabut, karena manajemen pangan kurang dipersiapkan dengan baik. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal¹⁵. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia haruslah mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri sehingga menghasilkan ketahanan pangan yang memadai. Penelitian menggunakan konsep ketahanan pangan karena berkaitan dengan tema penelitian, yaitu membahas tentang krisis pangan di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Krisis Pangan Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Kemunculan dan penularan Covid-19 dimulai di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 dan kemudian menyebar pada skala global dan dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Menjelang akhir Juli 2020, lebih dari 15 juta orang sudah dites positif mengidap Covid-19 dan menyebabkan lebih dari 610.000 kematian. Kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada bulan Maret 2020 dan menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah negara Indonesia. Mendekati akhir bulan Juli 2020, Covid-19 di Indonesia sudah menyebabkan sekitar 100.000 kasus terkonfirmasi dan sekitar 5.000 kematian¹⁶.

Di Indonesia, covid-19 telah menyebabkan masalah baru yaitu kekhawatiran akan pasokan pangan. Berdasarkan data dari Menteri Pertanian bahwa stok beras diperkirakan hanya mampu bertahan pada angka 14 juta ton antara bulan April dan Juni. Angka tersebut melebihi pertimbangan konsumsi masyarakat selama 3 bulan. Berdasarkan prediksi stok dan produksi, pemerintah harus bisa menentukan seberapa besar jumlah impor beras yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

¹⁵Virginia V. Rumawas, dkk., *Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Sruji Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)*, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 1, (2021): h. 2

¹⁶ John Hopkins University, "COVID-19 dashboard", <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

Indonesia mengalami kesulitan menjaga ketersediaan beras antara bulan November dan Januari karena pada bulan tersebut telah masuk dalam masa sulit akibat covid-19. Hal tersebut menyebabkan menurunnya produksi beras, sebagaimana pernyataan World Food Programme bahwa produksi besar pada awal pertama tahun 2020 menurun sekitar 13,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Diprediksi penurunan beras akan kembali terjadi pada musim panen berikutnya, dikarenakan sebagian wilayah Indonesia atau 30 persen daerah di Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang lebih panas dari biasanya.¹⁷ Kemungkinan besar Indonesia akan tetap bergantung pada impor beras untuk memenuhi kekurangan produksi dalam negeri. Dengan adanya wabah covid-19 menghadirkan tantangan baru bagi negara Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan selama masa pandemi. Adapun resiko yang kemungkinan besar terjadi adalah pandemi covid-19 dapat menekan pasar beras internasional sebab negara-negara pengimpor beras akan menerapkan pembatasan ekspor untuk memprioritaskan kebutuhan negara masing-masing¹⁷.

Pada awal bulan Maret masuknya wabah covid-19 di Indonesia belum mengalami kenaikan harga pangan secara drastis. Komoditas tertentu, harga pangan relatif stabil atau bahkan turun selama paruh pertama 2020. Harga beras, misalnya, bertahan pada Rp11.850/kg nyaris sepanjang waktu antara 13 Februari dan 2 Juni 2020. Harga beras naik menjadi Rp12.600/kg pada 21 Mei akibat naiknya permintaan beras selama Hari Raya Idul Fitri tetapi kembali ke angka Rp11.850/kg pada pekan berikutnya. Tren serupa juga teramati untuk harga minyak goreng yang bertahan pada Rp13.750/kg sejak Februari hingga Juni. Harga daging sapi juga stabil sampai 21 Mei, saat ia naik ke puncak harga sebesar Rp122.900/kg. Secara umum, harga daging sapi bertahan pada kisaran Rp118.000/kg antara Januari dan Juni. Namun, harga bawang merah naik signifikan dari Rp36.850/kg pada 2 Maret menjadi lebih dari Rp60.000/kg pada awal Juni. Harga gula juga naik signifikan mulai akhir Februari. Harga daging ayam naik sejak awal Mei setelah sebelumnya turun dari Rp35.050/kg pada 3 Januari menjadi Rp28.550/kg pada 21 April. Pada 8 Juni, harga daging ayam masih berada di kisaran Rp38.650/kg. Jadi, dapat dikatakan bahwa harga komoditas pangan cukup stabil, tetapi pemerintah perlu mengawasi dengan ketat setiap perubahan harga, khususnya harga beras¹⁸

¹⁷ Timothy Sulser, Shahnaila Dunston, "COVID-19 Related Trade Restrictions on Rice and Wheat Could Drive Up Prices and Increase Hunger", <https://www.ifpri.org/blog/covid-19-related-trade-restrictions-rice-and-wheat-could-drive-prices-and-increase-hunger> (18 September 2021)

¹⁸ Sirojuddin Arif, dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 41

Dikeluarkannya peraturan PSBB untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 telah mengganggu akses petani ke bahan baku dan pasar. Para petani melaporkan sulitnya mendapatkan tenaga kerja dan pupuk subsidi, serta adanya kenaikan harga input. Pada waktu yang bersamaan hotel, restoran dan bisnis catering ditutup, akibatnya permintaan pangan telah berkurang secara drastis sehingga petani kehilangan pembeli dan menghadapi harga beli yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi para petani dimana nilai tukar petani Indonesia menurun karena biaya untuk membayar biaya produksi lebih tinggi daripada harga yang mereka terima.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan sangat nyata, terutama dalam hal akses dan diversifikasi pola pangan. Masyarakat yang berada di luar Jawa berpotensi mengalami kelangkaan pangan apabila masalah distribusi tidak diatasi. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah pedesaan bisa beradaptasi dengan sumber makanan local untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun hal ini sangat sulit untuk diterapkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan area non- pertanian. Kurangnya akses fisik dan financial untuk pangan dapat menyebabkan banyak orang menderita kelaparan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank Dunia bahwa pada pertengahan bulan Mei 2020 31 persen rumah tangga mengalami kekurangan pangan dan 38 persen rumah tangga mengkonsumsi pangan lebih sedikit dari yang seharusnya. Setelah PSBB dilonggarkan pada bulan Agustus 2020 persentasenya sedikit baik meskipun angkanya tetap mengkhawatirkan. Keluarga yang paling banyak yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah keluarga prasejahtera, dikepalai oleh perempuan dan berada diluar Jawa dan cenderung mengalami syok pendapatan yang menunjukkan masalah kemampuan financial untuk membeli pangan.

Pandemi Covid-19 akan berimbas buruk tidak hanya pada ketahanan pangan tetapi juga pada gizi. Bagi kelompok miskin dan rentan, turunnya pendapatan telah mengakibatkan tidak hanya berkurangnya asupan pangan melainkan juga memburuknya kualitas pangan. Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia, harga pangan pokok, seperti beras dan jagung, jauh lebih rendah dari sayuran, buah, dan daging. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, lebih mungkin akan mengurangi konsumsi makanan ini saat pendapatan mereka turun. Covid-19 juga mengganggu pengangkutan produk pertanian, khususnya produk yang mudah rusak seperti sayuran, yang oleh karenanya turut menaikkan harga dan

membuat rumah tangga miskin makin sulit membelinya. Akibatnya, pandemi Covid-19 sangat mungkin menggerus status gizi kelompok miskin dan rentan¹⁹.

Beberapa negara didunia juga sedang mengalami ancaman resesi ekonomi seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong dan Singapura dengan pertumbuhan minus atau negatif sejak Triwulan II/2020 yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara produksi barang dengan konsumsi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sangat lambat, terjadi inflasi atau deflasi yang sangat tinggi, dan tingkat pengangguran yang juga tinggi, dan tingkat pengangguran yang juga tinggi akibat PHK.

Masalah ketahanan pangan sebagai dampak dari wabah Covid-19 juga merangkak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan mencegah masyarakat untuk mengakses makanan yang berkualitas dan pada saat yang sama harga pangan yang tinggi mencegah masyarakat keluar dari kemiskinan. Rata-rata orang Indonesia mengeluarkan hampir setengah dari pendapatannya hanya untuk makanan dan minuman. Perhitungan awal menunjukkan bahwa pandemi bisa meningkatkan angka kemiskinan dari 9,2 persen menjadi 9,7 persen dan meningkat drastis pada akhir tahun 2020 sekitar 16,7 persen. Artinya, angka kemiskinan bertambah sekitar 1,3 jut sampai 19,7 juta warga Indonesia yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera, menghapus perkembangan upaya pengurangan kemiskinan. Harga pangan yang tinggi akan menghambat upaya pengurangan kemiskinan setelah Covid-19.

Upaya Indonesia dalam Mengatasi Krisis Pangan

Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak problematika bagi masyarakat Indonesia, terutama terkait ketersediaan pangan. Telah muncul kekhawatiran bahwa dampak negatif Covid-19 terhadap perdagangan internasional dapat membahayakan negara-negara seperti Indonesia yang bergantung pada impor untuk memenuhi permintaan pangan dalam negeri. Pasokan kedelai, gula, dan daging sapi Indonesia sangat bergantung pada impor. Selain itu, sampai taraf tertentu, negara Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan beras. Meskipun, impor beras hanya sebesar 4% dari produksi dalam negeri pada 2018, impor ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri dan ketahanan pangan Indonesia. Kenaikan pada harga beras dapat berakibat besar pada kenaikan tingkat kemiskinan. Dimana 1% kenaikan harga beras akan meningkatkan tingkat kemiskinan di negara sebesar lebih dari 1%. Muncul kekhawatiran lainnya bahwa pandemi Covid-19 juga

¹⁹ Sirojuddin Arif, dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 43

dapat memengaruhi produksi pertanian dalam negeri. Beberapa data menunjukkan bahwa pasokan produk pertanian dalam negeri di Indonesia diperkirakan turun sebesar 6,2%²⁰.

Untuk mengantisipasi dampak Covid-19, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementan No. 1056/SE/RC.10/03/2020 tentang Strategi Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Pertanian menyatakan bahwa pemerintah akan berkonsentrasi pada lima prioritas²¹ yaitu:

1. Menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras dan jagung.
2. Mempercepat ekspor komoditas strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara.
3. Memberitahukan kepada petani dan penyuluh protokol kesehatan dari Kemenkes untuk membatasi penyebaran virus.
4. Mengembangkan pasar pertanian di masing-masing provinsi, meningkatkan konsumsi pangan lokal, dan membangun infrastruktur logistik serta sistem pemasaran elektronik untuk komoditas pertanian.
5. Menerapkan proyek padat karya di daerah perdesaan untuk membantu sektor pertanian dan menyediakan dana bagi masyarakat perdesaan untuk meringankan dampak negatif Covid-19.

Sebagai bagian dari upayanya untuk menstabilkan harga pangan, pemerintah melonggarkan pembatasan impor beberapa komoditas, khususnya karena Indonesia tengah memasuki liburan Idul Fitri pada 24– 25 Mei 2020. Untuk bawang putih dan bawang merah, misalnya, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan No. 27 Tahun 2020 yang mulai 19 Maret sampai 31 Mei 2020 mencabut sistem pemberian izin impor non- otomatis yang mewajibkan importir mendapatkan Surat Persetujuan Impor dan laporan surveyor dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan juga melonggarkan pembatasan impor gula dan membolehkan bukan hanya importir swasta melainkan juga badan usaha milik negara untuk mengimpor produk tersebut. Pada akhir April 2020, Kementerian Perdagangan sudah memberikan izin untuk impor lebih dari 680.000 ton gula mentah²².

Kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah adalah dilepaskannya stok pangan ke pasar untuk menurunkan harga komoditas pangan. Operasi pasar seperti ini bisa dilakukan tidak hanya oleh Pemerintah Pusat tetapi juga

²⁰Felippa Amanta dan Ira Aprilianti, "Ringkasan Kebijakan: Indonesian Food Trade Policy During Covid-19", (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2020), h. 3

²¹Sirojuddin Arif, dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 4 5

²²Sirojuddin Arif, dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 45

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan Rp25 triliun untuk mendukung infrastruktur logistik untuk pergerakan fisik bahan pangan²³.

Pemerintah juga memberikan insentif bagi petani untuk menjaga produksi mereka. Maka Kementerian Perdagangan merevisi peraturan yang sudah ada tentang pengadaan beras dalam negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2020 tentang Harga Beli Pemerintah. Peraturan ini menetapkan bahwa BULOG akan membeli beras petani jika harga komersial beras jatuh di bawah harga beli pemerintah. Jadi, sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah memantau dan siap mengintervensi pasar demi menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harganya²⁴.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana dari anggaran negara untuk mencegah pertumbuhan ekonomi negatif dan membantu penduduk miskin dan rentan menghadapi kondisi ekonomi sulit yang disebabkan oleh pandemi dan kebijakan PSBB. Pada Februari 2020 pemerintah mengumumkan dua tahap paket stimulus, masing-masing senilai Rp10,3 triliun dan Rp22,9 triliun (US\$0,7 miliar dan US\$1,6 miliar). Paket pertama yang diumumkan pada 25 Februari 2020 dimaksudkan untuk memberikan bantuan pangan dan subsidi hipotek perumahan untuk rumah tangga berpendapatan rendah serta insentif fiskal untuk perjalanan bisnis, sementara paket kedua dimaksudkan untuk memberikan potongan pajak bagi individu dan badan usaha.

Pada bulan berikutnya, pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang lebih besar. Pada 20 Maret 2020, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan kembali Rp62,3 triliun (US\$3,9 miliar) dana negara dari APBN 2020 untuk mengatasi pandemi COVID-19. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat paket penyelamatan di tiga sektor, yakni perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan usaha (Akhlash, 2020a). Sepuluh hari kemudian, pemerintah merevisi rencana tersebut dengan mengumumkan paket stimulus ekonomi lebih besar yang akan menaikkan pengeluaran negara hingga Rp405,1 triliun (US\$24,7 miliar). Dari pengeluaran tambahan tersebut, Rp150 triliun (US\$9,1 miliar) akan dialokasikan untuk

²³Sirojuddin Arif, dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 45

²⁴Sirojuddin Arif, dkk, *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020*, Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 45

mendanai program pemulihan ekonomi, seperti restrukturisasi kredit dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Porsi pengeluaran terbesar kedua, sebesar Rp110 triliun (US\$6,7 miliar), dialokasikan untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai bersyarat (PKH), bantuan pangan (terutama Program Sembako), dan Program Kartu Prakerja, sementara sisanya akan dialokasikan untuk perawatan kesehatan (Rp75 triliun atau US\$4,6 miliar), insentif pajak dan kredit untuk usaha (Rp71 triliun atau US\$4,3 miliar)²⁵.

Pemerintah juga mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara yang disahkan tanggal 13 Mei 2020 sebagai implementasi dari Pasal 11 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tersebut, PEN dilakukan dengan 4 modalitas dan kebijakan belanja negara²⁶ yaitu:

- a. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN
- b. Penempatan Dana pada lembaga perbankan (Bank Peserta)
- c. Investasi Pemerintah
- d. Penjaminan untuk kredit modal kerja termasuk untuk usaha UKM
- e. Belanja Negara termasuk namun tidak terbatas pada subsidi bunga bagi UMKM

Untuk menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yaitu (1) Percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin; (2) Tambahan sembako; (3) Tambahan kartu pra-kerja; (4) Pembebasan tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya listrik 450VA dan 900VA; (5) Penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH); (6) Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus pada kelompok kelas menengah ke atas (sektor pariwisata, restoran, transportasi, dll.). Sedangkan untuk mendorong investasi swasta, strategi yang dilakukan pemerintah adalah (1) pemberian Insentif pajak; (2) Insentif kepabeanan dan cukai; (3) Kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM; dan (4) Keringanan pembayaran bagi UMKM²⁷.

²⁵Marchio Irfan Gorbiano dan Adrian Wail Akhlaq, "Indonesia Announces Rp405 Trillion COVID-19 Budget, Anticipates 5% Deficit in Historic Move", The Jakarta Post. <http://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/indonesia-announces-rp-405-trillion-covid-19-budget-anticipates-5-deficit-in-historic-move.html> (17 September 2021)

²⁶Juli Panglima Saragihdan Mandala Harefa, "Mencegah Resesi Ekonomi dan Krisis Pangan Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19", *Parliamentary Review*, Vol. II, No. 3 (2020): h. 107

²⁷Juli Panglima Saragihdan Mandala Harefa, "Mencegah Resesi Ekonomi dan Krisis Pangan Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19", *Parliamentary Review*, Vol. II, No. 3 (2020): h. 107

Untuk mendukung kegiatan ekspor-impor di masa pandemi, pemerintah memberikan :²⁹

- a. Insentif pajak
- b. Insentif kepabeanan dan cukai
- c. Penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan serta pembatasan (lartas) ekspor-impor
- d. Percepatan proses ekspor-impor untuk *Reputable Traders*
- e. Peningkatan dan percepatan layanan ekspor-impor serta pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE).

Khusus untuk membantu pelaku UMKM pemerintah menganggarkan Subsidi bunga Rp34,15 triliun; Insentif perpajakan (PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah) sebesar Rp28,06 triliun; dan Penjaminan untuk kredit modal kerja baru untuk UMKM sebesar Rp125 triliun (PP Nomor 23 Tahun 2020)²⁸.

Kesimpulan

Di Indonesia, covid-19 telah menyebabkan masalah baru yaitu kekawatiran akan pasokan pangan. Dengan adanya wabah covid-19 menghadirkan tantangan baru bagi negara Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan selama masa pandemi. Adapun resiko yang kemungkinan besar terjadi adalah pandemi covid-19 dapat menekan pasar beras internasional sebab negara-negara pengimpor beras akan menerapkan pembatasan ekspor untuk memprioritaskan kebutuhan negara masing-masing.

Dikeluarkannya peraturan PSBB untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 telah mengganggu akses petani ke bahan baku dan pasar. COVID-19 dan PSBB memengaruhi distribusi komoditas pertanian melalui beberapa mekanisme. Pertama, penerapan PSBB berimbas buruk terhadap industri pariwisata secara umum, banyak hotel dan restoran terpaksa tutup akibat turunnya jumlah pengunjung. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap sektor pertanian karena permintaan bahan pangan ikut turun drastis. Pada saat yang sama, penerapan PSBB membuat banyak pemerintah daerah tidak hanya harus mengurangi jam operasi pasar tradisional tetapi bahkan harus menutupnya. Kebijakan ini membuat petani mengalami kesulitan untuk menjual produk mereka. Kedua, penerapan PSBB, khususnya pembatasan penerbangan dan sarana transportasi lain, turut mengganggu sistem logistik daerah-daerah tertentu yang bergantung pada daerah lain untuk memasok kebutuhan pangan mereka.

²⁸Juli Panglima Saragihdan Mandala Harefa, "Mencegah Resesi Ekonomi dan Krisis Pangan Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19", *Parliamentary Review*, Vol. II, No. 3 (2020): h. 107

Untuk mengantisipasi dampak Covid-19, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementan No. 1056/SE/RC.10/03/2020 tentang Strategi Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Pertanian menyatakan bahwa pemerintah akan berkonsentrasi pada lima prioritas yaitu : (1)Menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras dan jagung; (2) Mempercepat ekspor komoditas strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara; (3) Memberitahukan kepada petani dan penyuluh protokol kesehatan dari Kemenkes untuk membatasi penyebaran virus; (4) Mengembangkan pasar pertanian di masing-masing provinsi, meningkatkan konsumsi pangan lokal, dan membangun infrastruktur logistik serta sistem pemasaran elektronik untuk komoditas pertanian; (5) Menerapkan proyek padat karya di daerah perdesaan untuk membantu sektor pertanian dan menyediakan dana bagi masyarakat perdesaan untuk meringankan dampak negatif Covid-19.

Pemerintah juga mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara yang disahkan tanggal 13 Mei 2020 sebagai implementasi dari Pasal 11 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

Terjadinya pandemi Covid-19 yang tak terduga menambah lebih banyak tantangan yang dihadapi karena pandemi ini berpengaruh buruk terhadap hampir setiap aspek ketahanan pangan dan gizi, serta aspek-aspek lain dari pembangunan manusia. Pemerintah perlu memperluas focus kebijakannya dan tegas serta memastikan bahwa program yang dicanangkan tepat pada pihak yang paling membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanta, Felippa dan Ira Aprilianti. "Ringkasan Kebijakan: Indonesian Food Trade Policy During Covid-19", (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, 2020), h. 3
- Arif, Sirojuddin dkk. "Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020", Laporan Hasil Penelitian (Jakarta: Smeru Research Institute, 2020), h. 40
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. "Prakiraan Musim Kemarau Tahun 2020/2021 di Indonesia", <http://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-musim.bmkg> (17 September 2021)
- Creswell, John W. Research Design, (Qualitative, Quantitativ, and Mixed

- Methods Approaches), (California: Sage Publication, 2014), h. 32
- Dwijayanto, Andy. "Ini Solusi Terhadap Ancaman Pangan Selama Pandemi Covid-19", Kontan, <https://industri.kontan.co.id/news/ini-solusi-terhadap-ancaman-ketahanan-pangan-selama-pandemi-covid-19> (18 September 2021).
- Fahri, Abd. Jalil, Sri Kasnelly. "Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid-19)", Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 (2019):h. 47
- Gorbiano, Marchio Irfan dan Adrian Wail Akhlas. "Indonesia Announces Rp405 Trillion COVID-19 Budget, Anticipates 5% Deficit in Historic Move", The Jakarta Post. <http://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/indonesia-announces-rp-405-trillion-covid-19-budget-anticipates-5-deficit-in-historic-move.html> (17 September 2021)
- Hartadi, Firsty Nabila Putri. "Analisa Peran World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan di Guinea-Bissau Tahun 2016-2017", Skripsi. Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- John Hopkins University. "COVID-19 Dashboard". <https://coronavirus.jhu.edu/map.html> (18 September 2021)
- Justriadi, A. dkk. "Food Crisis Mitigation Management In The Covid Pandemic Era Covid-19", Journal of Governance and Local Politics, Vol. 2. No. 2 (2020): h. 217
- Natsir, Muhammad dkk. Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), h. 62
- Rachman, Handewi P. S. Mewa Ariani. "Ketahanan Pangan: Komsep, Pengukuran, dan Strategi", Jurnal FAE, Vol. 20, No. 1 (2002): h. 12.
- Rumawas, Virginia V. dkk. "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)", Jurnal Governance, Vol. 1, No. 1, (2021): h. 2
- Saragih, Juli Panglima dan Mandala Harefa, "Mencegah Resesi Ekonomi dan Krisis Pangan Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19", Parliamentary Review, Vol. II, No. 3 (2020): h. 107
- Suharyanto, Heri. "Ketahanan Pangan", Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2, (2011): h. 187
- Sulser, Timothy, Shahnila Dunston. "COVID-19 Related Trade Restrictions on Rice and Wheat Could Drive Up Prices and Increase Hunger", <https://www.ifpri.org/blog/covid-19-related-trade-restrictions-rice-and-wheat-could-drive-prices-and-increase-hunger> (18 September 2021)

Ubaedillah, A. dkk. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 84